



Jamkesda Yogya Tetap Berjalan

■ Yulianingsih

Pemkot mengalokasikan dana sebesar Rp 27,9 miliar untuk program Jamkesda.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) masih berjalan untuk masyarakat. Pemkot mempertegas itu dengan mengeluarkan surat edaran yang dilayangkan ke seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta.

Keterangan mengenai Jamkesda itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Kota Yogyakarta Nomor 405/09/SE/2015 tertanggal 26 Januari 2015. Surat edaran ini dikeluarkan setelah penerbitan buku pedoman penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Jamkesda masih memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi warga Kota Yogyakarta sampai dengan 2016," kata Sekretaris Kota Yogyakarta Titik Sulastri, Rabu (4/2).

Titik mengatakan, pelayanan itu diberikan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ada dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 19/2014 tentang Penyelenggaraan Jamkesda. Dalam perwal tersebut, kata dia, ada tujuh persyaratan. Antara lain, penduduk miskin yang tidak masuk dalam JKN maupun Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesmas) dengan identitas Kartu Menuju Sehat (KMS). Jumlah pemegang KMS pada 2015 ini ditetapkan sebanyak 18.881 kepala keluarga.

Selain itu, pengurus RT, RW, LPMK, PKK RW, kader kesehatan, pengelola tempat ibadah, dan penderita HIV/AIDS dengan identitas kartu Jamkesda, serta pasien Yogyakarta Emergency Services (YES) 118. Ada juga pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, tenaga bantu, serta penyandang masalah sosial yang bisa mengakses Jamkesda.

Seluruh warga Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) juga

masih bisa mengakses program jaminan kesehatan daerah, termasuk penduduk yang menjadi peserta "coordination of benefit".

Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan dana sebesar Rp 27,9 miliar untuk menjalankan program Jamkesda ini. Alokasi anggaran tahun ini tak jauh berbeda dibandingkan tahun lalu dengan kenaikan sekitar Rp 100 juta. Menurut Titik, penghentian program Jamkesda ini dilakukan setelah masyarakat masuk sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga 2016. Untuk itu, kata dia, dalam surat edaran pun disebutkan buku pedoman penyelenggaraan JKN akan diberikan ke masyarakat. Buku itu untuk mempermudah proses keikutsertaan masyarakat dalam mengurus JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (PJKD) Kota Yogyakarta, Umi Nur Chariyati, mengatakan, program Jamkesda ini nantinya akan terintegrasi dalam JKN yang akan dikelola BPJS Kesehatan. Hingga awal tahun ini, kata dia, sudah 63,78 persen warga Kota Yogyakarta yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. "Rata-rata dalam sebulan ada peningkatan kepesertaan secara mandiri sebanyak satu persen," kata dia.

Selain kepesertaan secara mandiri, menurut Umi, juga terdapat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berasal dari warga kurang mampu. Masyarakat Kota Yogyakarta mendapatkan kuota PBI sebanyak 105.632 peserta. Data tersebut berdasarkan hasil survei BPS yang dilakukan pada 2011. Namun, ia mengatakan, ada perbedaan dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinkes).

Menurut Umi, terdapat 40 ribu jiwa yang datanya tidak valid. "Sehingga perlu ada pemutakhiran data. Logikanya, penduduk Kota Yogyakarta yang menjadi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) langsung menjadi peserta PBI," kata dia.

■ antara ed:irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Jamkesda			

Yogyakarta, 04 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005